

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu dari sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dihimpun dari www.kemenkeu.go.id, realisasi APBN tahun 2019 atas penerimaan perpajakan disebutkan menyumbang 78,9% dari total pendapatan negara dan berdasarkan APBN 2020 diproyeksikan bahwa penerimaan perpajakan akan menyumbang 82.6% dari total pendapatan negara. Besarnya porsi pajak dalam penerimaan negara membuat pajak menjadi hal penting dalam pembangunan negara. Menurut Suandy (2016), bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Kasmir (2013), secara sederhana laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Laba yang merupakan salah satu informasi yang ada dalam laporan keuangan, utamanya menjadi fokus bagi pembaca laporan keuangan yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan mempunyai berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang

dapat merugikan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Perbedaan kepentingan ini seperti yang dijelaskan dalam teori agensi. Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*. Tindakan tersebut dikenal dengan manajemen laba (*earning management*). Manajemen laba merupakan intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal, dengan maksud untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989 dalam Dechow *et al*, 1995).

Adanya pajak sebagai beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan dan berdampak pada laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan memungkinkan perusahaan melakukan manajemen laba, salah satunya yaitu dengan meminimalkan beban pajak. Menurut Suandy (2016), meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar aturan yaitu perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* adalah proses

mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin (Suandy, 2016).

Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (PSAK 46). Contoh dari perbedaan temporer tersebut antara lain perbedaan antara jumlah tercatat aset terevaluasi dengan dasar pengenaan pajak (DPP), perbedaan metode/nilai depresiasi aset tetap, perbedaan dalam hasil penilaian persediaan, dan lain-lain.

Pajak yang merupakan penerimaan negara terbesar dari tahun ke tahun seringkali tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan, Dikutip dari www.detik.com (2019), terakhir kali DJP berhasil mencapai target penerimaan pajak yaitu pada 2008. Target penerimaan pajak pada 2008 sebesar Rp 535 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp 571 triliun atau 106,7% dari target. Lebih dari sepuluh tahun penerimaan pajak tidak tercapai. Berikut adalah pertumbuhan penerimaan pajak *year-on-year* (yoy) dari 4 sektor utama penyumbang pajak :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Sektor Usaha	y-o-y 2017	y-o-y 2018	y-o-y 2019
Manufaktur	17.10%	11.12%	-1.80%
Perdagangan	22.90%	23.72%	2.90%
Konstruksi	7.10%	7%	3.30%
Pertambangan	39.30%	51.15%	-19.00%

Sumber: kemenkeu.go.id/apbnkita

Rendahnya penerimaan pajak seringkali juga diakibatkan perusahaan melakukan *tax planning* guna kepentingan perusahaan agar laba yang dilaporkan dapat terlihat bagus dan pajak yang dibayarkan dapat serendah-rendahnya. Manajemen laba sering dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan minyak dan gas yang terdapat di Indonesia yaitu PT. Bumi Resource. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlibat sengketa atas dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bumi pada tahun 2010. Dikutip dari laman resmi DJP diketahui bahwa PT. Bumi

Resource melakukan penggelapan pajak dengan cara merekayasa laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan pelaporan untuk pembayaran pajak sehingga menyebabkan kerugian Negara hingga mencapai 1,5 Triliun Rupiah. DJP mendalami kasus penghindaran pajak tersebut sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 dan mulai melakukan jalur hukum pada tahun 2010. Selain itu kasus manajemen laba juga dilakukan oleh perusahaan milik Bakrie Group lainnya yaitu PT. Arutmin Indonesia dengan melakukan penggelapan pajak sebesar 39 juta dolar AS. Diketahui bahwa perusahaan milik Bakrie Group tersebut telah merugikan Negara melalui penggelapan pajak hingga mencapai angka 2,1 Triliun Rupiah. DJP mengungkapkan bahwa perusahaan – perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak dengan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang kerap disebut dengan pelaporan keuangan fiktif.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Aditama (2013) menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian Astutik dan Mildawati (2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2012-2014 mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik. Selain itu, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena

setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba.

Penelitian lain oleh Fitriani (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak yang terlalu besar sesuai laba yang diperoleh perusahaan maka perusahaan melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak sehingga laba yang dihasilkan nantinya akan kecil dan perusahaan akan membayar pajak yang kecil pula serta dengan adanya perencanaan pajak perusahaan dapat menunda pembayaran pajak, ini yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk memanajemen laba perusahaan tersebut. Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi manajemen laba karena beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Bila perusahaan menurunkan labanya pengaruhnya terhadap beban pajak tangguhan kecil sehingga bila ingin mendeteksi manajemen laba dalam perusahaan melalui beban pajak tangguhan tidak efektif karena beban pajak tangguhan tidak dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Negara dan Suputra (2017) menyatakan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin bagus perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa setiap kenaikan beban pajak tanggungan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

Penelitian oleh Putri (2018) yang meneliti perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba mendapat hasil bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan subjek penelitian yang berbeda yaitu pada Perusahaan Non-Manufaktur selain Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena setoran pajak sektor non-manufaktur selain sektor keuangan relatif kecil atau menurun tiap tahunnya dan maraknya *tax planning* yang dilakukan guna menekan pembayaran pajak, serta masih terdapat beberapa kasus manajemen laba oleh perusahaan non-manufaktur selain sektor keuangan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **Pengaruh *Tax Planning* dan Beban Pajak Tanggungan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non-Manufaktur selain Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur selain sektor keuangan ?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur selain sektor keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *tax planning* dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan objek dan rentang waktu yang berbeda yaitu perusahaan non-manufaktur selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kalangan akademisi mengenai pengaruh *tax planning* dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Kontribusi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis terutama dalam manajemen pajaknya.

